

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Daerah sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dana yang termasuk ke dalam APBD, terdiri dari pendapatan transfer dapat seperti dana perimbangan, dana keistimewaan, dana otonomi khusus, dan dana desa, yang bersumber dari APBN. Dana perimbangan dapat berupa DBH (Dana bagi hasil), DAU (dana alokasi umum), dan DAK (dana alokasi khusus).

Berkenaan dengan itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 16 yaitu APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang dirancang dan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan

pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam meminimalisir penyalahgunaan dan kesalahan pencatatan atas penggunaan dana, diperlukan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku entitas pelaporan wajib menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada masyarakat. Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang wajib disajikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 Ayat 4, Laporan Realisasi Anggaran yaitu laporan yang terdiri dari realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode tertentu. Untuk laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu entitas yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan, salah satunya termasuk Laporan Realisasi Anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait penggunaan dana yang berasal dari APBD. Dengan Laporan Realisasi Anggaran ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat jumlah belanja yang terelisasasi yaitu sebesar Rp38.127.531.749.249,00 atau 88,13% dari yang dianggarkan untuk keperluan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Realisasi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang masih di bawah target ini memberikan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk menganalisis lebih dalam terkait efektivitas atas realisasi belanja Pemerintah daerah provinsi jawa barat tahun 2020. Adanya Covid-19 juga memberikan pengaruh pada realisasi belanja. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan atas Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam karya tulis tugas akhir ini, antara lain:

1. Bagaimana pengalokasian belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020?
2. Bagaimana efektivitas atas realisasi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020?
3. Mengapa terdapat perbedaan rencana anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis tugas akhir ini, antara lain:

1. Mengetahui pengalokasian belanja pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020.

2. Mengetahui efektivitas atas realisasi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020.
3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis akan berfokus pada pembahasan mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, dimana pembahasan akan mencakup:

1. Tinjauan atas kesesuaian rencana anggaran dan realisasinya pada tahun anggaran 2020 di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Tinjauan atas efektivitas penyerapan anggaran di tahun 2020 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap karya tulis tugas akhir ini mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan masyarakat luas terkait klasifikasi jenis atau pos-pos belanja sesuai dengan PSAP serta efektivitas penyerapan realisasi belanja.
2. Dapat menjadi sarana informasi dan membantu penulis maupun masyarakat luas untuk mengimplementasikan pemahaman praktik ilmu Akuntansi Pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penulisan karya tulis tugas akhir, rumusan masalah yang akan diangkat, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan memaparkan teori mengenai data, fakta, dan ketentuan atas objek yang dibahas dalam karya tulis tugas akhir, yaitu gambaran mengenai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terkait realisasi belanja tahun 2020.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam mengumpulkan data serta memaparkan hasil tinjauan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang akan dibandingkan dengan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan, literatur yang mendukung, juga data dan fakta yang terjadi di lapangan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil tinjauan yang telah dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pribadi penulis dan khalayak umum.